



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD SANI ROYCHANSYAH
2. Jabatan : KETUA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
3. NHK : 971077

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.262.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 502 m2/320 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 3.000.000.000
2. Tanah Seluas 354 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.062.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 3.706 m2/3.706 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 315.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI X-FORCE ULTIMATE 1.5L 4X2/AT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOBIL, SUZUKI BALENO 3K5FX(4X2) AT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
3. MOTOR, PIAGGIO VESPA LXV 3V IE A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 160 CC Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 625.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 510.522.430

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	6.712.522.430
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.712.522.430

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.